

INOVASI BIROKRASI PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (MELIHAT KEBIJAKAN E-PROCUREMENT)

Amalia Syauket¹, Sri Poedji Lestari², Rajanner P Simarmata³

Universitas Bhayangkara Jaya ¹, Universitas Bung Karno ²

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara³

*¹amalia.syauket@dsn.ubhara.ac.id, ²beningkes@gmail.com,

³janner_smmt@yahoo

Abstract: Until the end of 2019, Indonesia's ranking in the anti-corruption institution was still in a stagnant position, it had not moved significantly in its ranking. The ranking is based on the aspect of the ease of investing in a country. Factors that have a significant effect on the high and low rankings of Indonesia are Indonesia's bureaucracy and corruption. Various bureaucratic pathologies have made the bureaucracy ineffective and inefficient in carrying out government functions. Since the reign of President Sukarno to President Joko Widodo, corruption in Indonesia has continued from Sabang to Merauke, therefore the commitment to eradicate corruption in Indonesia is very important .. The manifestation of the Indonesian Government's commitment to eradicating corruption is to make enough laws and regulations in Indonesia, but corruption is still rampant because there are still legal loopholes that corruptors can abuse to get out of legal traps. The Indonesian government has made various efforts to eradicate corruption, one of which is by establishing an Anti-Corruption Agencies. Then in the era of globalization which is characterized by digitalization, the Government has also taken to eradicate corruption, which is getting more massive both from its impact and from its actors. This shows that efforts to eradicate corruption are in line with advances in information technology, especially based on communication technology (e-Gov). This study was conducted qualitatively using a variety of secondary materials in the form of literature and internet sources compiled descriptively, with the aim of increasing new understanding of how to eradicate corruption through electronic government, as a solution to preventing corruption so that Indonesia's competitiveness improves.

Keywords : Bureaucracy, corruption and E-Gov.

Abstrak: Sampai dengan akhir tahun 2019, peringkat Indonesia di Lembaga antikorupsi masih pada posisi stagnan, belum bergerak secara signifikan peringkatnya. Pemeringkatan tersebut berdasarkan aspek kemudahan berinvestasi di suatu Negara. Factor yang berpengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya peringkat di Indonesia adalah birokrasi dan korupsi Indonesia. Berbagai patologi birokrasi telah menyebabkan birokrasi tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan

fungsi pemerintahan. Sejak masa Pemerintahan Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo, korupsi di Indonesia terus terjadi dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu Komitmen Pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting.. Wujud Komitmen Pemerintah Indonesia untuk upaya memberantas korupsi adalah membuat cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi korupsi masih merajalela karena masih terdapat celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan membentuk Badan Anti Korupsi (*Anti Corruption Agencies*). Kemudian di Era globalisasi yang bercirikan digitalisasi pun ditempuh oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi, yang semakin massif baik dari dampaknya maupun aktornya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi seiring dengan kemajuan Teknologi informasi khususnya berbasis teknologi komunikasi (e-Gov) Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan berbagai bahan sekunder baik berupa literature dan sumber internet disusun secara deskriptif, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman baru tentang bagaimana upaya pemberantasan korupsi melalui pemerintahan elektronik, sebagai salah satu solusi dalam pencegahan korupsi agar daya saing Indonesia membaik.

Kata kunci : Birokrasi, korupsi dan E-Gov.

LATAR BELAKANG

Desakan reformasi birokrasi mengharuskan keterlibatan Pemerintah masyarakat dan sinergi dunia usaha. Penggunaan e-government paling baik terkait erat dengan pelaksanaan prioritas pembangunan. Upaya memperbaiki birokrasi dari berbagai patologi birokrasi cepat atau lambat untuk meminimalisir korupsi yang menjadi ancaman Bangsa Indonesia.

Ide Pembaruan dalam birokrasi sebetulnya sudah ada sejak lama,, namun Gagasan Pembaruan belum cukup populer dalam ranah birokrasi. Hal ini disebabkan pengaruh kuat hegemoni dari prinsip-prinsip birokrasi Weber. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi telematika guna mensukseskan target *good*

governance serta mengakselerasi terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan telah mempopulerkan istilah E-Government (Bill n.d.). Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Presiden Joko Widodo akan memperkuat sistem pemerintahan elektronik dengan menggunakan minimal lima sistem pada tahun 2020, yaitu sistem pengelolaan arus kas; pajak daring; penganggaran elektronik; dan sistem pembelian elektronik; serta katalog elektronik untuk sistem pembocoran korupsi (Anugrah 2015). Artinya, pernyataan Presiden Jokowi menginginkan adanya terobosan baru yang positif. Dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing SDM menuju Indonesia maju 2045 (Anugrah 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif dalam bentuk fenomenologi, yang mencakup informasi tentang fenomena utama (fenomena sentral) berupa kebijakan e-proc sebagai inovasi birokrasi pemerintahan anti korupsi. Kekuatan penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa referensi, jurnal dan berbagai media informasi yang relevan dan valid. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi sepanjang penelitian, baik data dari teori dan jurnal terbaru dan berbagai sumber relevan lainnya. Ini dilakukan untuk memvalidasi data penelitian. Jenis penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif dalam bentuk fenomenologi, yang mencakup informasi tentang fenomena utama (fenomena sentral) berupa kebijakan e-proc sebagai inovasi birokrasi pemerintahan anti korupsi. Kekuatan penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa referensi, jurnal dan berbagai media informasi yang relevan dan valid. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi sepanjang penelitian, baik data dari teori dan jurnal terbaru dan berbagai sumber relevan lainnya. Ini dilakukan untuk memvalidasi data penelitian (Cresswell 2014).

PEMBAHASAN

Inovasi Birokrasi di Indonesia

Mike David menekankan bahwa perubahan yang konstan dan fleksibilitas merupakan syarat untuk memulai birokrasi yang inovatif. Pembaruan birokrasi organisasi membutuhkan inovator. Seorang Pemimpin harus mampu

menjelaskan konsep pembaruan secara sistemik, mampu menjelaskan secara jelas tentang tujuan dan langkah serta bagaimana proses adopsi konsep tersebut dilaksanakan. Seorang pimpinan harus memiliki jiwa *curiosity, honesty dan ownership* dalam melakukan inovasi. Terdapat empat arahan dalam merintis inovasi birokrasi yaitu: **pertama** maksimalkan bekal intelektual pegawai baru di Organisasi. Karena pertumbuhan gagasan untuk pembaruan memerlukan kader baru yang sangat berperan dalam pengembangan konsep dan aplikasi pembaruan, **Kedua** dalam merencanakan kegiatan organisasi sebaiknya bersikap terbuka dan menumbuh-kembangkan umpan balik, **Ketiga** memaksimalkan ide dengan memanfaatkan para pakar. untuk menumbuhkan gagasan dan penciptaan pembaruan ,pemerintah harus mengundang ahli yang berpengalaman untuk menunjukkan jalan bagaimana sebuah gagasan pembaharuan dikembangkan dalam pemerintahan (Davis 2003).

Korupsi di Birokrasi Pemerintahan

Para Birokrat dalam menggerogoti uang negara menggunakan berbagai macam cara. Modus pertama yang biasa dilakukan adalah praktek penggelapan, praktek pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, dan markup proyek, sebagai contoh kasus dari tindakan modus tersebut adalah penyunatan, penyupaan, manipulasi data/ dokumen, pelanggaran prosedur, penunjukkan langsung tanpa melalui tender atau lelang, lain-lain bentuk termasuk kolusi antara eksekutif dan legislatif, serta mengubah spesifikasi barang. Modus kedua korupsi adalah pembuatan aturan.

Modus ini terjadi dengan melibatkan DPRD dengan sub modus yang digunakan adalah: a). Penggelembungan (mark-up) batas alokasi penerimaan anggota Dewan; b). Penggandaan (redundant) pada pos penerimaan ; dan c). beberapa Pos anggaran yang tidak ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dana purnabakti yang menjadi kasus korupsi paling ramai di seluruh Indonesia. Modus korupsi di kalangan Dewan terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, merupakan modus korupsi yang dilegalisasi, karena korupsi tersebut disahkan melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPRD, yang seharusnya DPRD menjadi lembaga pengawas penggunaan dana APBD. Salah satu dari tiga (3) model pemberantasan korupsi sebagai upaya reformasi yang

dikemukakan Quah dianut oleh Indonesia yaitu dengan pembentukan KPK mengikuti model Anti-Corruption Legislation with an Independent Agency (Quah 1994).

Pemerintahan elektronik (e-Gov) meminimalisir Korupsi

E-government singkatan dari *electronics government*. atau e-gov, atau digital government, atau online government ataupun dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk : a. memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya; b. urusan bisnis; dan c. serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan, serta d. menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis, E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal (JMC n.d.).

Aplikasi E-Gov dipercaya sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Bukan bermaksud menggantikan sistem pemerintahan justru memperkuat sistem pemerintahan dengan berbasis teknologi komunikasi.

Secara umum, E-Government dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online, sehingga melalui sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah (N 2018).

Mengacu pendapat Richardus Eko Indrajit pemicu utama berkembangnya konsep E-Government yaitu: Pertama, era globalisasi yang datang sangat cepat bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan orang telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, HAM, hukum, transparansi, korupsi, masyarakat sipil, pasar terbuka dan lain lain, menjadi hal pokok yang harus diperhatikan setiap bangsa agar tidak diasingkan dari pergaulan dunia. Kedua, kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebar ke seluruh lapisan masyarakat diberbagai belahan dunia dalam hitungan detik saja. Ketiga, hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; sebagai contoh jika terbukti terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur lainnya. Dengan demikian, e-gov dipandang sebagai sebuah alat yang dapat memberantas korupsi dan bertujuan terbentuknya birokrasi yang transparan, efektif dan efisien, membangun proses bisnis pemerintahan yang dinamis serta membangun interaksi antara pemerintah, masyarakat dan bisnis (Indrajid 2006).

Menurut UU NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu manfaat E-Government adalah meningkatkan **transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance** merupakan salah satu manfaat dari E-Government[9] Shim dan Eom berpendapat bahwa *e-government* adalah alat yang efektif untuk mengurangi korupsi dengan mempromosikan tata pemerintahan yang baik (Shim, D., C., & Eom, T. 2008). Secara khusus, *e-government* dapat mengurangi perilaku korupsi secara eksternal yaitu meningkatkan hubungan dengan warga negara dan secara internal dengan lebih efektif mengendalikan dan memantau perilaku karyawan (Sumartono, Ake Wihandanto 2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa *e-government* memiliki dampak positif yang konsisten dalam mengurangi korupsi (Rahayu 2018).

Hal ini tampak pada E-Procurement (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Transparansi, Non Diskriminatif, Mengurangi kesempatan ber KKN, Tidak perlu bertatap muka karena dalam proses e-proc peluang tatap muka dengan panitia lelang akan tereduksi dengan sendirinya, sehingga bisa diminimalisir terjadinya KKN yang semakin parah adalah keuntungan-keuntungan menerapkan E-Procurement. Cara yang efektif untuk mengurangi korupsi adalah dengan E-Government, karena pada dasarnya korupsi merupakan sebuah pengadaan, baik barang, peralatan atau lainnya. Saat memakai E-government, Tindakan KKN dapat terpantau menggunakan data-data yang ada.

KESIMPULAN

Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan merupakan Kebijakan inovatif e-procurement diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan tindak korupsi di Indonesia (Pengembangan, Direktorat Penelitian dan 2007). Sekalipun sudah ada kebijakan inovatif berupa e-procurement namun bukan berarti dapat

memberantas korupsi secara tuntas tetapi dapat meminimalisir terjadinya kolusi, nepotism dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tidak maksimalnya sistem atau kebijakan e-proc ini dikarenakan kurangnya pengawasan saat pengadaan barang dan jasa sehingga mudah sekali diintervensi oleh pihak lain yang tidak terkait langsung dan rendahnya integritas para penyelenggara Negara sendiri. Selain itu, menunjukkan pejabat pemeriksa barang kerap dilakukan sebatas formalitas tidak memperhatikan kualifikasi yang dimilikinya

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. 2007. *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia.
- Anugrah, Perkasa. 2015. "PENCEGAHAN KORUPSI: 5 Sistem Pemerintahan Elektronik Diperkuat." *Bisnis.Com*. Retrieved (<https://kabar24.bisnis.com/read/20151211/16/500689/pencegahan-korupsi-5-sistem-pemerintahan-elektronik-diperkuat>).
- Cresswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method*. 4th ed. Thousand Oaks.
- Davis, Mike. 2003. "Building Innovative Bureaucracies, Change Structure and the Science of Ideas." *Public Manager*.
- Indrajid, Richadus Eko. 2006. *Electronic Government, Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- JMC, Jenny. n.d. "Pertumbuhan E-Government Di Indonesia."
- N, Sita. 2018. "Penerapan Sistem E-Government Di Indonesia." Retrieved (www.goodnewsfromindonesia.id).
- Pengembangan, Direktorat Penelitian dan, KPK. 2007. "Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement."
- Quah, John S. T. 1994. "Controlling Corruption in City-States: A Comparative Study of Hong Kong and Singapore." *Crime, Law and Social Change Journal* 22(4).
- Rahayu, Indah. 2018. "E-Government Sebagai Strategi Anti Korupsi." Retrieved (www.kompasiana.com).
- Shim, D., C., & Eom, T., H. 2008. "E-Government and Anti-Corruption: Empirical Analysis of International Data." *Intl Journal of Public Administration* 31:298–316.

Sumartono, Ake Wihandanto, Vita Elysia. 2017. "Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia." 14.